

Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Teknologi Sebagai Upaya Memperkuat Keamanan Maritim di Indonesia

I Wayan Yuliarta^{1✉}, Hayatul Khairul Rahmat²

¹ Program Studi Magister Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Indonesia

² Program Studi Magister Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Indonesia

DOI: [HTTP://DX.DOI.ORG/10.26623/JDSB.V23I1.1698](http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v23i1.1698)

Abstrak

Indonesia sebagai *marine mega-biodiversity* terbesar di dunia membuat Indonesia sangatlah penting untuk memperkuat keamanan maritimnya dengan pemberdayaan masyarakat pesisir sehingga tercapai kesejahteraan pada masyarakat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai upaya memperkuat keamanan maritim di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan analisis isi. Temuan dari penelitian ini adalah keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam program-program pemberdayaan yang tidak hanya sebatas sebagai pelaksana program, tetapi juga dilibatkan didalam perumusan dan pembuatan program sehingga masyarakat merasa bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan termotivasi sehingga program berjalan dengan baik. Harapannya, dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis teknologi turut ambil andil dalam mendukung keamanan maritim Indonesia dan juga turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Abstract

Indonesia as the largest marine mega-biodiversity in the world makes Indonesia very important to strengthen its maritime security by empowering coastal communities so that the welfare of the community can be achieved. The purpose of this paper is to explain the improvement of welfare through empowerment of coastal communities as an effort to strengthen maritime security in Indonesia. This paper uses a literature research method with a content analysis approach. The findings of this study are that community involvement is needed in empowerment programs that are not only limited to implementing the program, but also involved in the formulation and creation of the program so that the community feels responsible for program implementation and is motivated so that the program runs well. The hope is that with community involvement in efforts to empower technology-based coastal communities, it will take part in supporting Indonesia's maritime security and also improve the welfare of these communities.

Keywords : *Maritime Security; Coastal Communities; Empowerment; Technology.*

PENDAHULUAN

Konsep *sea power* kerap kali dimengerti bertujuan buat menampilkan kedudukan pasukan angkatan laut serta strategi angkatan laut dalam mengurai sesuatu ancaman ialah berbentuk kemampuan perang antar negeri (Wardani, 2021). Bueger (dalam Hutabarat, Ma'arif, Zulbainarni, & Yusgiantoro, 2021) menarangkan lebih tegas kalau konsep keamanan maritim bisa dimengerti secara universal serta konsep keamanan maritim bisa dianalisis dengan metode mengeksplorasi ikatan sesuatu sebutan dengan sebutan lain. Konsep keamanan maritim hadapi pergantian cocok dengan dinamika yang terjalin pada suatu negeri.

Mahan dalam bukunya *The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783* mengemukakan kalau dibutuhkan enam elemen utama yang diperlukan suatu negeri buat memiliki kekuatan laut (*sea power*) yang kokoh ialah letak geografi, bangun muka bumi, luas serta panjang daerah, kepribadian penduduk, jumlah penduduk, serta kepribadian pemerintah. Pergantian pola sosial warga dunia serta didukung oleh kompleksitas kasus dikala ini, membuat paradigma menimpa keamanan maritim jadi terus menjadi luas (Desai, 2020; Ko, Kim, & Bae, 2021).

Bueger dalam tulisannya juga menekankan beberapa masalah besar lainnya ke dalam empat dimensi utama, seperti *economic development, environment, human security*, dan

national security. Namun, era baru inovasi teknologi menghadirkan peluang besar untuk melindungi lautan kita, memelihara populasi ikan yang sehat, memberi makan tiga miliar orang dan melindungi mata pencaharian lebih dari 260 juta, dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.

Bicara menimpa keamanan maritim, Indonesia ialah negeri maritim besar yang mempunyai bermacam-macam kemampuan sumber energi, paling utama sumber energi laut yang mempunyai tingkatan keanekaragaman biologi yang sangat besar. Perihal ini dibuktikan dengan istilah Indonesia selaku Marine Mega-Biodiversity terbanyak di dunia (Izra, Chipta, Pertiwi, & Rostikawati, 2021). Indonesia memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Tiga puluh tujuh persen spesies ikan di dunia dapat ditemukan di Indonesia dan beberapa spesies ikan tersebut memiliki nilai ekonomis tinggi. Ikan-ikan dengan nilai ekonomis tinggi seperti tuna, cakalang, udang, tenggiri, kakap, cumi-cumi dan ikan-ikan karang seperti kerapu, baronang dan lobster. Sedangkan untuk potensi perikanan tangkap laut sekitar 6,5 juta ton/tahun, perikanan budidaya air payau mencapai 2,9 juta hektar dan potensi budidaya laut mencapai 12,55 juta hektar (Budiono & Purba, 2020). Hal ini dapat dilihat pada infografis pada Gambar 1 sebagai berikut.



Gambar 1. Potensi Sumber Daya Maritim Indonesia

Berdasarkan isu tersebut, perlu adanya tata kelola maritim secara terpadu, serta bentuk implementasi pembangunan berkelanjutan yang diperlukan untuk mengelola sumber daya laut di Indonesia. Adapun akhirnya tercapai tujuan untuk mengedepankan kesejahteraan bangsa dan negara untuk kedaulatan melalui sektor kemaritiman (Bradford, 2005; Bueger, 2015).

Masalah terbesar Indonesia, terutama dalam bidang pengelolaan sumber daya maritim adalah lambannya penyesuaian diri masyarakat dalam menghadapi globalisasi, terutama bagaimana masyarakat memanfaatkan teknologi digital sebagai nilai dukung didalam melakukan aktivitas pekerjaan pada sektor perikanan dan kelautan (Ridho & Sudirman, 2020). Teknologi informasi sendiri merupakan suatu tools yang akan membantu kinerja nelayan, namun masih menuai banyak kendala, seperti terbatasnya infrastruktur teknologi informasi dan kemampuan masyarakat. Maka diperlukan kerja sama dari berbagai pihak untuk terselenggaranya lingkungan masyarakat nelayan berbasis teknologi.

Pemberdayaan masyarakat maritim merupakan sebuah usaha dimana kita

memberi kebudayaan bagi masyarakat maritim. Upaya pemberdayaan yang maksud adalah membangun persepsi positif terhadap manfaat teknologi digital dan upaya untuk membangun persepsi positif terhadap kemudahan menggunakan teknologi ini. Pemberdayaan adalah transisi dari keadaan tidak berdaya ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan, nasib, dan lingkungan seseorang) (Budiwibowo, 2016). Dalam pendekatan proses pemberdayaan dimungkinkan untuk implementasi pembangunan yang memanusiakan manusia.

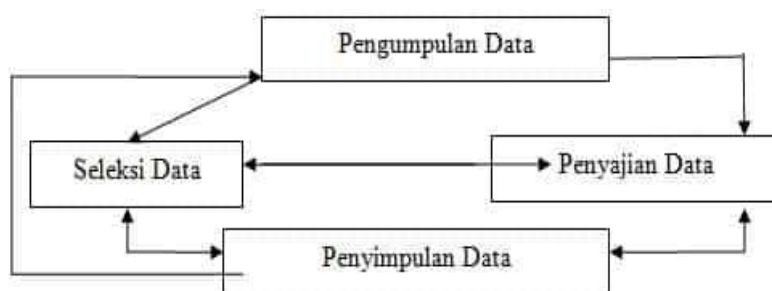
Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai upaya memperkuat keamanan maritim di Indonesia.

METODE

Tulisan ini disusun menggunakan metode kepustakaan. *Library research* ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi bacaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dilakukan pemahaman cara teliti dan careful sehingga mendapatkan

sebuah temuan-temuan penelitian (Aminullah, Priambodo, Rahmat, & Adri, 2021; Rahmat, Muzaki, & Pernanda, 2021; Rahmat & Pernanda, 2021; Rahmat, Sari, et al., 2020; Rahmat, Widana, Basri, & Musyrifin, 2021). Penulis melakukan studi literatur secara mendalam untuk mendukung penelitian ini dan menggunakan analisis isi (*content analysis*) (Alawiyah,

Rahmat, & Pernanda, 2020; Najib & Rahmat, 2021; Priambodo, Widyaningrum, & Rahmat, 2020; Putri, Metiadini, Rahmat, & Ukhsan, 2020; Rahmat, Nurmalasari, Puryanti, & Syifa'ussurur, 2020; Widha, Rahmat, & Basri, 2021; Zed, 2002). Adapun model interaktifnya dijelaskan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Model Interaktif Analisis Konten

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keamanan Maritim

Pembicaraan tentang keamanan kelautan adalah segmen kecil mulai sejak diskursus tentang keamanan nasional. Oleh karena itu, aliran keamanan nasional yang dianut oleh sebuah kawasan ketentuan mematok bagaimana keamanan maritim dipahami dan dipraktikkan di dalam kebijakan nasional (Keliat, 2009; Semuel, Indriyanto, & Loho, 2020). Marsetio mengatakan bahwa keamanan maritim merupakan suatu kondisi lingkungan maritim yang bebas dari segala ancaman terhadap wilayah kedaulatan Indonesia dan penegakan hukum nasional dan internasional untuk terwujudnya kepentingan nasional Indonesia (Adikara & Munandar, 2021).

Bueger (2015) menggunakan tiga teori yang berbeda untuk menjawab pertanyaan “Apa keamanan maritim itu: semiotika, sekuritisasi, dan praktik keamanan”. Dia menegaskan bahwa

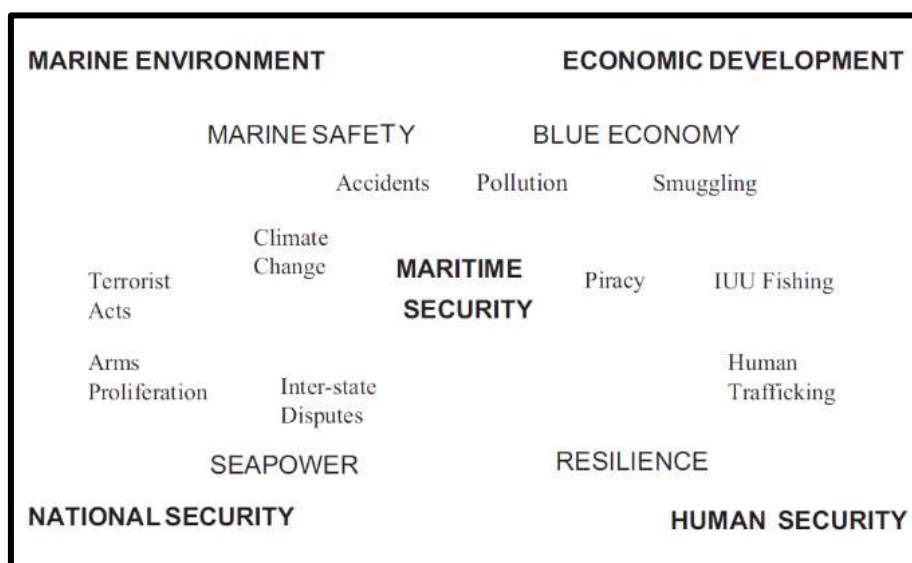
tidak ada definisi yang diterima secara global yang mengakibatkan implikasi konsekuensi dan dia mendekati keamanan maritim sebagai kata kunci, yang menghasilkan perbedaan pendapat yang tak berkesudahan tentang apa artinya dalam praktiknya.

Keamanan maritim juga berkaitan dengan pembangunan di bidang ekonomi, dimana laut berperan sangat penting dalam perdagangan, dan perikanan. Laut mengandung sumber daya alam yang sangat penting, seperti minyak, dan bahan tambang dari dasar lautan. Pariwisata pantai juga menjadi sumber pendapatan ekonomi yang penting. Konsep keamanan manusia juga terkait dengan keamanan maritim, yang mengandung unsur-unsur seperti ketersediaan makanan, ketersediaan tempat tinggal, kehidupan berkelanjutan, dan tersedianya lowongan kerja yang aman (Anwar, 2018).

Pada abad ke-21, tren isu yang banyak terdapat pada domain maritim adalah isu keamanan. Keamanan maritim

dapat dipahami dengan cara mengorganisir konsep yang lebih tua dan lebih baru. Ini mencakup konsep keselamatan laut, tenaga laut, ekonomi biru (blue economy) dan ketahanan (Al Syahrin, 2018; Rahmat, Ramadhani, et al., 2020; Wardani, 2021). Mempelajari hubungan-hubungan ini mengarah pada garis besar matriks keamanan maritim yang dapat digunakan untuk memetakan pemahaman yang berbeda tentang

keamanan maritim dan mengeksplorasi bagaimana berbagai aktor menempatkan ancaman (Anwar, 2018; Santoso, Anwar, & Waluyo, 2020). Bueger (2015) dalam tulisannya juga menekankan beberapa masalah besar lainnya ke dalam empat dimensi utama, seperti economic development, environment, human security, dan national security. Adapun matriks keamanan tersebut dijelaskan dalam Gambar 3.



Gambar 3. Matriks Keamanan Maritim

Bagi Indonesia, isu keamanan maritim merupakan cakupan isu nasional dan internasional. Ini disebabkan karena bentuk geografis Indonesia yang merupakan kepulauan, serta letak strategis Indonesia relative terhadap negara-negara lain, terutama negara-negara asia dan Australia. Ini membuat masalah keamanan maritim yang lokal dapat berekskalasi menjadi masalah interasional, begitu pula sebaliknya. Isu keamanan maritim internasional dapat dengan mudah berubah menjadi masalah keamanan maritim nasional.

Menurut Feldt (dalam Chapsos & Malcolm, 2017), terdapat tujuh hal yang dapat dikategorikan sebagai keamanan maritim, yakni: (1) keamanan dan

perdamaian nasional dan internasional; (2) kedaulatan, integritas teritorial dan kebebasan politik; (3) keamanan komunikasi jalur laut; (4) perlindungan keamanan dari kejahatan laut; (5) keamanan sumberdaya, akses terhadap sumberdaya laut dan dasar laut; (6) perlindungan lingkungan; dan (7) keamanan para pelaut dan nelayan. Persoalan keamanan maritim adalah masalah keamanan yang sering terjadi di wilayah perairan laut.

Redefinisi Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suhendra (dalam Dai, 2020), pemberdayaan adalah suatu activities yang dynamic sustainability

secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi. Dalam kegiatan ini, masyarakat diberikan pendampingan dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.

Tujuan *empowerment* yaitu usaha pemberian bantuan kepada masyarakat memperoleh kemampuan dalam pengambilan keputusan (*decision making*) dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi hambatan sosial dalam pengambilan tindakan (Laksono & Rohmah, 2019; Rahmat, Banjarnahor, Ma'rufah, & Widana, 2020). Secara bertahap, adapun tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Menumbuhkan kesadaran, pengetahuan (*knowledge*), dan pemahaman bagi masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga menjadi sebuah tindakan atau perilaku.

Sementara itu, menurut Suharto (dalam Hakim, Banjarnahor, Purwanto, Rahmat, & Widana, 2020; Utama, Prewito, Pratikno, Kurniadi, & Rahmat, 2020) menjelaskan prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan masyarakat jika dilihat dari perspektif pekerjaan sosial di antaranya:

1. Pemberdayaan merupakan suatu proses kerja sama atau kolaborasi.
2. Masyarakat ditempatkan sebagai aktor yang memahami dan dapat menjangkau berbagai kesempatan.
3. Masyarakat dapat berpikiran bahwa dirinya sendiri adalah important agent yang dapat memberikan suatu perubahan.

4. Kemampuan akan diperoleh dan mendapatkan ketajaman melalui berbagai pengalaman (*experience*).
5. Solusi-solusi dari permasalahan akan ditemukan berbagai keragaman faktor yang mempengaruhi situasi masalah tersebut.
6. Masyarakat akan bisa berpartisipasi dalam pemberdayaan berdasarkan rumusan mereka.
7. Kunci dalam pemberdayaan adalah tingkat kesadaran dari masyarakat.
8. Akses terhadap sumber dan kemampuan yang digunakan dalam pemberdayaan secara efektif.
9. Kegiatan pemberdayaan lebih bersifat *dynamic*, *synergy*, dan *evolutive*.

Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Globalisasi menuntut setiap pihak untuk dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan pola yang ada (Estuningtyas, 2018; Lalo, 2018). Globalisasi akhirnya mempengaruhi sistem kerja dan persaingan secara global, khususnya bagaimana globalisasi membuat perkembangan teknologi semakin pesat. Globalisasi dan perkembangan teknologi digital juga menyentuh sektor kelautan perikanan. Saat ini juga berbagai negara telah berupaya mengembangkan teknologi digital pada sektor kelautan dan perikanan sebagai penunjang kinerja dalam eksplorasi sumber daya hingga sistem pelayanan.

Selain pengembangan *software* dan *hardware*, edukasi, pemahaman dan kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan. Kesadaran akan pentingnya teknologi digital akan juga membantu berbagai pihak dalam tetap memberikan inovasi dan pembaharuan, khususnya bagaimana pemanfaatan teknologi digital ini dapat dievaluasi

dengan baik dan menuju solusi yang solutif.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat pesisir menjadi sesuatu yang krusial, melalui pemberdayaan masyarakat pesisir terutama peningkatan penggunaan teknologi digital diharapkan terbangun tingkat kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri (Butarbutar, Sintani, & Harinie, 2020; Tanzil & Irawan, 2020). Dengan memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga kemungkinan hadirnya berbagai bentuk ancaman terhadap keamanan maritim dapat diminimalisir atau bahkan tidak ada ancaman. Menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan bahwa kemungkinan hadirnya tindak kejahatan diakibatkan rendahnya kualitas kesejahteraan masyarakat. Perlu disadari bahwa kriminal atau tindak kejahatan dapat terjadi akibat kurangnya perhatian negara dan rendahnya kualitas hidup masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu kata kunci dalam kajian keamanan manusia (*human security*) dalam hubungan internasional atau kajian kemanusiaan lainnya. Pada pemberdayaan masyarakat, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam bentuk partisipasi perlibatan di dalam program-program pemberdayaan tidak hanya sebatas sebagai pelaksana program tapi juga dilibatkan didalam perumusan dan pembuatan program sehingga masyarakat merasa bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan termotivasi sehingga program berjalan dengan baik.

SIMPULAN

Isu keamanan maritim merupakan cakupan isu nasional dan internasional. Ini disebabkan karena bentuk geografis

Indonesia yang merupakan kepulauan, serta letak strategis Indonesia relative terhadap negara-negara lain, terutama negara-negara Asia dan Australia. Indonesia sebagai *Marine Mega-Biodiversity* terbesar di dunia menjadikan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu kata kunci dalam kajian keamanan manusia (*human security*). Guna mendukung keamanan nasional tersebut yang diimplementasikan melalui keamanan maritim, maka keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam bentuk partisipasi perlibatan di dalam program-program pemberdayaan tidak hanya sebatas sebagai pelaksana program tapi juga dilibatkan didalam perumusan dan pembuatan program sehingga masyarakat merasa bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan termotivasi sehingga program berjalan dengan baik. Harapannya, dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis teknologi turut ambil andil dalam mendukung keamanan maritim Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikara, A. P. B., & Munandar, A. I. (2021). Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 13(1), 83–101. <https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4365>
- Al Syahrin, M. N. (2018). Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia. *Indonesian Perspective*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.14710/ip.v3i1.20175>
- Alawiyah, D., Rahmat, H. K., &

- Pernanda, S. (2020). Menemukenali konsep etika dan sikap konselor profesional dalam bimbingan dan konseling. *Jurnal MIMBAR: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani Volume*, 6(2), 34–44. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v6i2.457>
- Aminullah, A. A., Priambodo, A., Rahmat, H. K., & Adri, K. (2021). KESIAPAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BALIKPAPAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA GUNA MENYAMBUT PEMINDAHAN IBUKOTA BARU. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(1), 51–59.
- Anwar, S. (2018). Membangun Keamanan Maritim Indonesia Dalam Analisa Kepentingan, Ancaman, Dan Kekuatan Laut. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(3), 69–90. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i3.315>
- Bradford, L. J. F. (2005). The Growing Prospects for Maritime Security Cooperation in Southeast Asia. *Naval War College Review*, 58(3), 63–86.
- Budiono, S., & Purba, J. T. (2020). Memerangi kemiskinan melalui partisipasi pendidikan dan air bersih pada kabupaten dan kota di Indonesia. *Media Ekonomi*, 28(1), 67–78. <https://doi.org/10.25105/me.v28i1.7572> ISSN 572
- Budiwibowo, S. (2016). Revitalisasi Pancasila Dan Bela Negara Dalam Menghadapi Tantangan Global Melalui Pembelajaran Berbasis Multikultural. *Citizenship: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 565. <https://doi.org/10.25273/citizenship.v4i2.1083>
- Bueger, C. (2015). What is maritime security? *Marine Policy*, 53, 159–164. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>
- Butarbutar, D. N. P., Sintani, L., & Harinie, L. T. (2020). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pemberdayaan Perempuan. *Journal of Environment and Management*, 1(1), 31–39. Retrieved from <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/jem/article/view/1203>
- Chapsos, I., & Malcolm, J. A. (2017). Maritime security in Indonesia: Towards a comprehensive agenda? *Marine Policy*, 76, 178–184. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2016.11.033>
- Dai, N. F. (2020). Stigma Masyarakat Terhadap Pandemi Covid-19. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROBLEMATIKA SOSIAL PANDEMI COVID-19 “Membangun Optimisme Di Tengah Pandemi Covid-19,”* 66–73.
- Desai, S. (2020). India’s Theatre Expansion: Use of Sea Power to Balance China’s Rise. *Indian Public Policy Review*, 2(1), 29–44.
- Estuningtyas, R. D. (2018). Dampak globalisasi pada politik, ekonomi, cara berfikir dan ideologi serta tantangan dakwahnya. *Al-Munzir*, 11(2), 195–218.
- Hakim, F. A., Banjarnahor, J., Purwanto, R. S., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Pengelolaan obyek pariwisata menghadapi potensi bencana di Balikpapan sebagai penyangga ibukota negara baru. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(3), 607–612. <https://doi.org/10.31604/jips.v7i3.2020.607-612>
- Hutabarat, T. S. N. B., Ma’arif, M. S., Zulbainarni, N., & Yusgiantoro, P.

- (2021). Strategi pemanduan terpadu untuk mencapai kesetimbangan ekonomi dan keamanan di Selat Malaka dengan pendekatan SSM. *Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Bisnis*, 7(1), 11–22.
- Izra, Z., Chipta, E., Pertiwi, M. P., & Rostikawati, R. T. (2021). Keanekaragaman Echinodermata di Pantai Cibuaya Ujung Genteng, Jawa Barat Echinoderms Diversity in Cibuaya Beach Ujung Genteng, West Java. *Jurnal Ilmu Dasar*, 22(1), 9–18.
- Keliat, M. (2009). Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 13(Juli), 19.
- Ko, H. S., Kim, S., & Bae, Y. H. (2021). Study on Optimum Power Take-Off Torque of an Asymmetric Wave Energy Converter in Western Sea of Jeju Island. *Energies*, 14, 1449. <https://doi.org/10.33390/en14051449>
- Laksono, B. A., & Rohmah, N. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Sosial Dan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 14(1), 1–11. <https://doi.org/10.17977/um041v14i1p1-11>
- Lalo, K. (2018). Menciptakan Generasi Milenial Berkarakter dengan Pendidikan Karakter guna Menyongsong Era Globalisasi. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(2), 68–75.
- Najib, A., & Rahmat, H. K. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana di Desa Buluh Cina, Siak Hulu, Kampar, Riau. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 14–23.
- Priambodo, A., Widyaningrum, N., & Rahmat, H. K. (2020). Strategi Komando Resor Militer 043/Garuda Hitam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung. *PERSPEKTIF*, 9(2), 307–313. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3588>
- Putri, H. R., Metiadini, A., Rahmat, H. K., & Ukhsan, A. (2020). Urgensi pendidikan bela negara guna membangun sikap nasionalisme pada generasi millennial di Indonesia. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 5(2), 257–271. <https://doi.org/10.31604/muaddib.v5i2.257-271>
- Rahmat, H. K., Banjarnahor, J., Ma'rufah, N., & Widana, I. D. K. K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 91–107.
- Rahmat, H. K., Muzaki, A., & Pernanda, S. (2021). Bibliotherapy as An Alternative to Reduce Student Anxiety During Covid-19 Pandemic : a Narrative Review. *Proceeding of International Conference on Science and Engineering*, 4(February), 379–382.
- Rahmat, H. K., Nurmalasari, E., Puryanti, L. D., & Syifa'ussurur, M. (2020). Understanding the Counselor's Competence in Guidance and Counseling Services with Inclusive Perspective. *Proceedings of International Conference on Da'wa and Communication*, 2(1), 281–289. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3739078>
- Rahmat, H. K., & Pernanda, S. (2021). THE IMPORTANCE OF DISASTER RISK REDUCTION THROUGH THE PARTICIPATION OF PERSON WITH DISABILITIES IN INDONESIA. *Proceeding of*

- Batusangkar International Conference V*, 137–148.
- Rahmat, H. K., Ramadhani, R. M., Ma'rufah, N., Gustaman, F. A. I., Sumantri, S. H., & Adriyanto, A. (2020). Bantuan China Berupa Alat Uji Cepat Covid-19 Kepada Filipina: Perspektif Diplomacy and International Lobbying Theory. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 30(1), 19–27. <https://doi.org/10.23917/jpis.v30i1.10623>
- Rahmat, H. K., Sari, F. P., Hasanah, M., Pratiwi, S., Ikhsan, A. M., Rahmanisa, R., ... Fadil, A. M. (2020). Upaya pengurangan risiko bencana melalui pelibatan penyandang disabilitas di Indonesia: Sebuah tinjauan kepustakaan. *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*, 6(2), 70–75. <https://doi.org/10.33172/jmb.v6i2.623>
- Rahmat, H. K., Widana, I. D. K. K., Basri, A. S. H., & Musyrifin, Z. (2021). Analysis of Potential Disaster in The New Capital of Indonesia and its Mitigation Efforts : A Qualitative Approach. *Disaster Advances*, 14(3), 40–43.
- Ridho, M., & Sudirman, A. (2020). Signifikansi Keamanan Maritim Di ASEAN. *MANDALA: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 3(2), 165–182.
- Santoso, I. A. P., Anwar, S., & Waluyo, S. D. (2020). Peran siberkreasi dalam meningkatkan kemampuan literasi digital untuk mencegah aksi radikalisme. *Jurnal Peperangan Asimetris*, 6(1), 43–64.
- Semuel, O. W., Indriyanto, M. N., & Loho, A. M. (2020). Perilaku sosial budaya masyarakat dan implikasinya pada nilai-nilai kewarganegaraan. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(4), 25–33.
- Tanzil, L., & Irawan, A. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Perbatasan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial*, 9(2), 129–139.
- Utama, D. B., Prewito, H. B., Pratikno, H., Kurniadi, Y. U., & Rahmat, H. K. (2020). Kapasitas pemerintah Desa Dermaji Kabupaten Banyumas dalam pengurangan risiko bencana. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(3), 591–606. Retrieved from <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/1984>
- Wardani, A. K. (2021). MARITIME SECURITY REGULATION CONCERNING INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE 2002 AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA. *Lampung Journal of International Law (LaJIL)*, 3(1), 19–28. <https://doi.org/10.25041/lajil.v3i1.1985>
- Widha, L., Rahmat, H. K., & Basri, A. S. H. (2021). A Review of Mindfulness Therapy to Improve Psychological Well-being During the Covid-19 Pandemic. *Proceeding of International Conference on Science and Engineering*, 4(February), 383–386.
- Zed, M. (2002). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.